

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal:

- Anindita, Sisis. 2019. Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Lokal Atas Masuknya Tenaga Kerja Asing Pasca Berlakunya Perpres No. 20 Tahun 2018. Universitas Airlangga Vol. 2 No. 3.
- Ansell, Chris dan Gash, Alinson. 2008. “*Collaborative Governance in Theory and Practice*”. *Journal of Public Administration Research and Theory*, Vol. 18, No. 4, Hal 543–571. University Of California.
- Ansori, A. A., & Angin, R. (2018). Mekanisme Penyaluran Tenaga Kerja di Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Bondowoso. *Politico*, 18(1).
- Arief, Verdico. 2014. Kolaborasi Antar Lembaga Dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Sepintu Sedulang di Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Tesis Bandung: Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjajaran.
- ARIF, M. (2017). Analisis Peran Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis Dalam Penempatan Tenaga Kerja Lokal Di Kecamatan Mandau (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).
- Ervianti, M. 2018. “Faktor-Faktor Yang Menghambat *Collaborative Governance* Dalam Implementasi Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas Di Kota Pekanbaru”. *Jom Fisip*, Vol. 5, Hal 1–13.
- Fairuza, Mia. 2016. Kolaborasi antar *Stakeholder* dalam Pembangunan Inklusif pada Sektor Pariwisata. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara UNAIR*.
- Handika, T., & Hamim, S. (2019). Peranan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis Dalam Penempatan Tenaga Kerja Lokal di PT. Wahana Karsa Swandiri Kecamatan Mandau. *Publika*.
- Hardiansyah, 1991- (penulis). (2018). Kualitas pelayanan publik / Dr.Hardiansyah, M.Si.. Yogyakarta, Gava Media.
- Hariandja, Marihot Tua Efendi. 2002. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Grasindo.
- Haryono, N. (2012). Jejaring untuk membangun kolaborasi sektor publik. *Jurnal Jejaring Administrasi Publik*, 4(1), 47-53.
- Hasibuan, Malayu S.P. 2009. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.

- Irawan, D. (2017). *Collaborative Governance* (studi deskriptif proses pemerintahan kolaboratif dalam pengendalian pencemaran udara di kota surabaya). *Kebijakan dan Manajemen Publik*, 5(3), 1-12.
- Khotimah, K. H. (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Dan Penempatan Tenaga Kerja Lokal Terhadap Perusahaan Yang Tidak Mempekerjakan Pekerja Lokal Di Kabupaten Penajam Paser Utara. *Lex Suprema Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2).
- Lalamentik, K. B. J., Hayat, A., & Sentanu, G. E. P. S. (2021). *Collaborative Governance* Dalam Meningkatkan Kualitas Pencari Kerja Melalui Program Kartu Prakerja (Studi Di Platform Edukasi Kreatif “Lingkaran” Sebagai Lembaga Pelatihan Program Kartu Prakerja) (Doctoral dissertation, Universitas Brawijaya).
- Lestari, T. L., Rosyadi, S., & Tobirin, T. (2022). *Collaborative Governance* Dalam Pelayanan Publik. *JDKP Jurnal Desentralisasi dan Kebijakan Publik*, 3(1), 363-375.
- Linden, R.M. 2002. *Working Across Boundaries: Making Collaboration Work In Government and nonprofit organizations*. San Francisco: Jossey-Bass Published.
- Millenia T & Khairul I. 2021. Proses Rekrutmen dan Seleksi: Potensi Ketidakefektifan dan Faktornya . *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan Untidar* 6 (3) 2021, 11-27.
- Mulyana, Deddy. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018.
- Noviarini, U., & Widiastuti, S. (2019). Realisasi Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 Pada Perusahaan Di Kabupaten Purbalingga. *Agora*, 8(1), 90-100.
- Praja, S. J., & Auzola, F. (2021). Implementasi Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penempatan Tenaga Kerja Lokal Di Kota Pekanbaru Provinsi Riau. *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*, 17-23
- Raharja, Sam'un Jaja. 2008. *Model Kolaborasi dalam Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Citarum*. Disertasi. Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.
- Santa Maria, I., & As' ari, H. (2022). Komunikasi Antar Implementor Kebijakan Penempatan Dan Pemanfaatan Tenaga Kerja Lokal Di Kabupaten Pelalawan. *Journal Publicuho*, 5(3), 616-625.
- Sastrohadwiryo, Siswanto dan Asri Hadaningsih. *Manajemen Tenaga Kerja*

Indonesia: pendekatan administratif dan operasional. Jakarta: PT Bumi Aksara. 2019.

Schuler, Randall S. dan Jackson, Susan E. 1997. Manajemen Sumber Daya Manusia - Menghadapi Abad Ke-21. Jakarta: Gelora Aksara Pratama.

Sepriandi, S., & Hussein, R. (2014). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi *Collaborative Governance* dalam Penanganan Pekerja Migran Bermasalah di Kota Tanjungpinang *Factors Affecting Collaborative Governance in Handling Deprived Migrant Workers City*. Sumber, 201(30,661), 15-1.

Siswanto, Bejo. 2005. Manajemen Tenaga Kerja Indonesia Pendekatan Administratif dan Operasional. Jakarta: Bumi Aksara.

Siswanto, R. S. R, 2020. Evaluasi Perda Kabupaten Siak No. 11 Tahun 2001 Tentang Penempatan Tenaga Kerja Lokal. Jurnal Sumber Daya Manusia Unggul (Jsdmu), 1(1), 41-47

Sufianti, E. 2014. Kepemimpinan dan Perencanaan Kolaboratif pada Masyarakat Non- Kolaboratif, Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota Vol. 25, No. 1.

Sugiyono. 2020. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta

Sunyoto, Danang. 2012. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: BukuSeru.

Suwatno. 2003. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Erlangga

Tojiri, Ahmad. *Collaborative Governance* Dinas Ketenagakerjaan Dalam Menyediakan Lapangan Pekerjaan Di Kawasan Industri Kabupaten Bekasi. Diss. Fisip Unpas, 2022.

Dokumen:

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Purbalingga Tahun 2022

Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Purbalingga Tahun 2022

Rencana Kinerja (Renja) Tahun 2023 Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Purbalingga

Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026

Peraturan Perundang-Undangan :

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2016
Tentang Penempatan Tenaga Kerja

Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis
Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten
Purbalingga Tahun 2021-2026

Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun
2021-2026.

